

Komunikasi Inklusif dalam Mendorong Kolaborasi Keagamaan: Studi Kasus Masjid Syuhada Yogyakarta

Angga Nur Rohman¹

Maulana Syarifudin²

Mevy Eka Nurhalizah³

Unun Achmad Alimin⁴

Corresponding Author: angganur234@gmail.com

Abstract: This study examines the role of inclusive communication practices at Masjid Syuhada Yogyakarta in fostering inter-organizational religious collaboration amid increasing exclusivity in mosque governance in Indonesia. While many mosques are institutionally affiliated with specific religious organizations or political interests, this study adopts a qualitative case study approach to explore an alternative communicative model. Drawing on Jurgen Habermas's concepts of the religious public sphere and communicative action, the analysis evaluates how organizational narratives and practices articulate validity claims of truth, appropriateness, and sincerity. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that Masjid Syuhada sustains an inclusive communicative environment by maintaining a non-partisan stance, cultivating dialogical spaces resembling an ideal speech situation, and institutionalizing communicative neutrality across diverse Islamic organizations. This positioning enables the mosque to function as a living religious public sphere that facilitates collaboration beyond ideological boundaries.

Keywords: Inclusive communication, *syuhada* mosque, religious public sphere, communicative action.

Abstrak: Studi ini membahas peran komunikasi inklusif Masjid Syuhada Yogyakarta dalam membangun kolaborasi keagamaan di tengah kecenderungan eksklusivitas pengelolaan masjid di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kerangka teori *public sphere* dan *communicative action* Jurgen Habermas diterapkan untuk mengevaluasi praktik komunikasi organisasi masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Syuhada mengembangkan strategi komunikasi inklusif dengan mempertahankan posisi non-partisan, membangun ruang dialog yang merepresentasikan *ideal speech situation*, serta memenuhi klaim validitas komunikasi, yakni kebenaran, ketepatan, dan kejujuran. Posisi netral ini memungkinkan masjid berfungsi sebagai ruang publik keagamaan yang terbuka bagi berbagai organisasi Islam dengan latar ideologis berbeda.

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya

² UIN Sunan Ampel Surabaya

³ UIN Sunan Ampel Surabaya

⁴ UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Di era kontemporer, peran suatu institusi keagamaan sering kali berada dalam pusaran polarisasi politik dan fragmentasi sosial. Kondisi ini berdampak pada menyempitnya fungsi sosial masjid sebagai ruang publik yang inklusif. Afiliasi organisasi dan kepentingan politik praktis mendorong berkembangnya eksklusivitas, sehingga masjid cenderung bertransformasi menjadi ruang tertutup yang membatasi kelompok dengan pandangan keagamaan berbeda.

Dalam konteks Indonesia, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang identitas dan interaksi sosial umat Muslim. Namun, keberagaman organisasi Islam dengan orientasi ideologis yang beragam kerap menghadirkan tantangan dalam pengelolaan ruang keagamaan. Tanpa mekanisme dialog yang inklusif, perbedaan tersebut berpotensi melemahkan kohesi sosial dan memperkuat fragmentasi internal uma (Indriana & Rohim, 2025). Oleh karena itu, kebutuhan ruang netral yang mampu menjembatani perbedaan antara kelompok beragama, akan bernilai sangat penting untuk membangun ekosistem kolaborasi keagamaan yang sehat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik eksklusivitas banyak ditemukan dalam pengelolaan masjid di Indonesia, mulai dari pembatasan akses jamaah hingga pengabaian tanggung jawab institusional terhadap kepentingan public (Adriansyah & As-Salafiyah, 2025). Situasi ini diperparah oleh terbentuknya *echo chambers* dalam komunikasi keagamaan, terutama ketika masjid terafiliasi secara kuat dengan kekuatan politik atau organisasi tertentu. Akibatnya, peluang dialog lintas pemahaman dan kolaborasi sosial menjadi terbatas, sementara fungsi masjid sebagai mediator perdamaian dan ruang publik keagamaan semakin tereduksi (Ryu, 2025).

Untuk membaca problem tersebut, konsep *public sphere* dan *communicative action* yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas menawarkan kerangka teoritik yang relevan. Gagasan *ideal speech situation*, yang menekankan proses komunikasi bebas dari dominasi, paksaan, dan kepentingan kekuasaan, menyediakan landasan normatif bagi terbentuknya ruang dialog yang setara dalam masyarakat multicultural (Habermas et al., 2013). Meskipun teori ini banyak

digunakan dalam kajian politik, penerapannya dalam konteks komunikasi organisasi keagamaan, khususnya masjid, menjadi signifikan dalam merespons kecenderungan eksklusivitas dan fragmentasi yang berkembang.

Namun demikian, kajian tentang masjid di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yang menekankan simbolisme historis, arsitektur, dan fungsi keagamaan normative (Swarthout, 2013). Pendekatan tersebut memang memberikan kontribusi penting bagi pemahaman identitas Islam, tetapi cenderung memosisikan masjid sebagai objek historis alih-alih sebagai institusi sosial yang hidup dan tertanam dalam proses komunikasi keagamaan sehari-hari (Mibtadin & Hedi, 2020). Akibatnya, perhatian terhadap analisis strategi komunikasi inklusif yang mampu mendorong dialog dan kolaborasi antar-organisasi keagamaan masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang membuka ruang bagi kajian yang menempatkan masjid sebagai arena komunikasi publik dan tindakan komunikatif dalam masyarakat Muslim yang plural.

Masjid Syuhada di Yogyakarta menyajikan studi kasus yang inspiratif sekaligus anomali analitis dibandingkan dengan kebanyakan masjid yang ada di Indonesia. Memiliki sejarah sebagai masjid perjuangan kemerdekaan dan melawan ideologi kolonialisme, institusi ini berhasil dalam mempertahankan posisinya sebagai organisasi non-partisan di tengah politik Indonesia yang fluktuatif dan beragam kelompok organisasi keagamaannya. Sejarah Masjid Syuhada menunjukkan upaya dalam memberikan respon persaingan ideologis melalui cara-cara kultural tanpa ada paksaan sebagai upaya membangun komunikasi aktif. Pada masa periode persaingan politik yang terjadi dan munculkan gerakan kiri pada pertengahan abad ke-20, masjid menjalankan fungsi pendidikan dan sosial secara luas untuk memperkuat nilai-nilai Islam tanpa harus terlibat dalam kepentingan politik yang terbuka (Oktarina & Asnaini, 2018). Strategi tersebut memberikan dampak bagaimana lembaga keagamaan mampu mengekspresikan kekuatan lunak dengan membentuk otoritas tersendiri, moral, jaringan sosial dan legitimasi budaya dibandingkan keterlibatan langsung dalam politik partisipan. Sudut pandang yang

dapat dilihat dari Masjid Syuhada adalah integrasi unik antara Islam, nasionalisme, dan modernitas. Masjid menghindari berbagai afiliasi dengan organisasi Islam atau partai tertentu untuk menjaga inklusifitas dan sebagai ruang ibadah bersama bagi berbagai kelompok Muslim (Hidayah, 2018). Lembaga ini memperkuat perannya sebagai sebuah kawasan sektarian, keterbukaan pendidikan, dan partisipasi pemuda dalam mencerminkan pendekatan adaptif terhadap perubahan sosial dan kehidupan agama perkotaan.

Biasanya masjid perkotaan mengandalkan manajemen yang berbasis pada komunitas tradisional seperti adanya takmir, berbeda dengan Masjid Syuhada memiliki model tatakelola yang berbasis Yayasan sejak pertama kali berdiri. Melalui model tersebut, masjid memiliki batasan otoritas berbasis lingkungan organisasi, sehingga dapat dengan mudah berinteraksi dengan elit nasional, lembaga pendidikan, dan kelompok sosial keagamaan yang salah satunya adalah kunjungan peneliti untuk menggali informasi terkait dengan masjid (Mohammed et al., 2025). Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual seperti salat, mengaji, pendidikan agama dan pertemuan-pertemuan antar komunitas keagamaan tertentu. Tetapi menjadi ruang publik Habermasian dimana berbagai organisasi Islam dapat berinteraksi secara setara, tanpa mempermasalahkan perbedaan politik. Netralitas yang ditunjukkan masjid bukan sikap pasif, melainkan suatu strategi komunikasi aktif untuk menciptakan ruang inklusif dan fasilitas kerjasama lintas organisasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan studi masjid di Indonesia telah banyak dilakukan, namun pada umumnya berfokus pada peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi, komunikasi, dan pendidikan. Dalam masjid Syuhada Yogyakarta, kajian yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek manajemen, kelembagaan, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial (Hidayati et al., 2025; Syuhada et al., n.d.; Yusuf, 2023). Misalnya, penelitian Mayang (n.d.) berjudul *Masjid Syuhada Yogyakarta's development in zakat, Infaq, and Shadaqah from 2015 to 2019*, yang memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi masjid dalam mengumpulkan zakat sampai dengan *shadaqah*. Penelitian lainnya berjudul *Deradikalisasi Masjid Inklusi: Upaya*

Penghapusan Ideologi Radikal di Yogyakarta yang dilakukan oleh Mulyani menganalisis aspek pendidikan tanpa menganalisa bagaimana peran tata kelola mampu mempertahankan ideologi dan menghapus ideologi radikal dalam konteks ini adalah ideologi komunis (Mulyani, 2019). Sementara itu penelitian Pratiwi tentang manajemen dakwah berbasis masjid, menganalisa bagaimana kesuksesan masjid Syuhada dalam managerialnya (Pertiwi, n.d.).

Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana masjid sebagai institusi keagamaan mengelola posisi netralitasnya untuk memfasilitasi kolaborasi antar-organisasi Islam maupun aktor politik dengan latar fragmentasi ideologis yang berbeda. Kekosongan literatur inilah yang menjadi pijakan penelitian ini, yang menerapkan teori *communicative action* Jürgen Habermas untuk menganalisis strategi komunikasi inklusif yang dikembangkan oleh Masjid Syuhada Yogyakarta.

Dari sini, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi komunikasi inklusif dan penempatan posisi netral Masjid Syuhada mampu membangun ekosistem kolaborasi antara organisasi Islam. Kerangka berpikir Habermas digunakan agar mampu mengevaluasi implementasi klaim validitas, kebenaran, ketepatan, dan kejujuran, dalam narasi komunikasi organisasi masjid. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi komunikasi organisasi Islam serta menawarkan model praktis bagi pengelolaan masjid dalam merespons tantangan ideologis dan polarisasi global.

Jürgen Habermas memiliki konsep *public sphere* (ruang publik) dan *communicative action* yang dapat menjadi solusi dalam masyarakat multikultural. Habermas memiliki konsep situasi komunikasi yang ideal (*ideal speech situation*) yang berlangsung tanpa adanya dominasi, paksaan, atau

Kajian
Literatur

kepentingan pragmatis kekuasaan (Habermas, 1984). Menurut peneliti, meskipun teori ini banyak digunakan untuk studi politik, penerapannya dalam konteks komunikasi organisasi keagamaan khususnya masjid sangat relevan melihat kondisi yang ada di atas. Selain itu penelitiannya juga terbatas, Indonesia menjadi negara yang memiliki sejuta masjid, namun studi yang dilakukan sebagian besar berfokus pada simbolisme historis, arsitektur dan fungsi keagamaan secara normative. Hasil studi tersebut banyak memberikan wawasan berharga untuk perkembangan identitas Islam, masjid menjadi objek sejarah dari pada sebagai institusi hidup yang tertanam dalam proses sosial keagamaan (Mibtadin & Hedi, 2020).

Tindakan komunikatif dapat mencapai tujuan, terdapat empat klaim validitas yang harus dipenuhi diantaranya klaim kebenaran, ketepatan, kejelasan, dan kejujuran. Pemenuhan klaim tersebut sangat sesuai dalam menilai peran komunikasi inklusif Masjid Syuhada dalam membangun kolaborasi keagamaan. Mengingat, komunikasi inklusif tidak akan terbangun jika tidak terdapat elemen-elemen tersebut dan sangat penting dalam menempatkan komunikasi sesuai dengan kebutuhannya (Habermas & McCarthy, 1987). Hal tersebut dibutuhkan mengingatkan Habermas menyampaikan bahwa kondisi dunia ini berada dalam dua ruang yang bertentangan yaitu ruang komunikasi yang autentik dan ruang yang dibangun karena sistem politik. Dengan menganalisisnya, mampu menjawab peran masjid ini sebagai ruang terbuka bagi kebutuhan umat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Sugiono, 2014). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali dinamika internal sebuah institusi keagamaan secara mendalam, fenomena strategi komunikasi inklusif di Masjid Syuhada. Masjid Syuhada dipilih karena memiliki sejarah panjang dan signifikan dalam perkembangan Islam modern Indonesia, menunjukkan pola

komunikasi yang jarang diterapkan oleh masjid lain, memiliki rekam adaptasi terhadap perubahan ideologi, sosial, dan politik, serta berfungsi sebagai komunikasi inklusif dalam berinteraksi antar organisasi Islam.

Lokasi penelitian berada di kompleks Masjid Syuhada, Kota Baru, Yogyakarta, sebuah area perkotaan yang dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai *Garden City* dan sejak kemerdekaan berkembang menjadi pusat aktivitas pendidikan, sosial, dan keagamaan. Masjid Syuhada berdiri pada 1950-an sebagai monumen perjuangan nasional sekaligus pusat pembinaan umat. Jejaring pendidikan, sosial, dan kultural yang melekat pada masjid menjadikannya ruang sosial-keagamaan unik yang kaya untuk dianalisis. Jenis data pada penelitian ini berupa data tekstual, historis dan lapangan. Detail jenis data penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan kategori data primer dan sekunder:

Tabel 1. Jenis dan Kategorisasi Data

No	Jenis Data	Kategorisasi Data	
		Primer	Sekunder
1	Histori & Profil Masjid Syuhada		✓
2	Strategi komunikasi inklusif masjid	✓	
3	Kolaborasi masjid dengan organisasi keagamaan	✓	
4	Adaptasi dan perubahan sosial	✓	
5	Hubungan keraton, negara, dan masyarakat	✓	
6	Regenerasi Pemuda		✓
7	Kegiatan Pendidikan dan sosial masjid		✓

Sumber data penelitian terbagi juga kedalam data primer dan sekunder, data primer penelitian ini meliputi data-data lapangan pada (1) Masjid Syuhada Yogyakarta, (2) Ketua umum harian dan pengurus masjid dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari (1) berbagai penelitian berupa buku, laporan maupun jurnal tentang Masjid Syuhada. (2) fakta dan berita tentang

Masjid Syuhada melalui platform pemberitaan resmi. Pengumpulan data, penulis menggunakan tiga teknik. Pertama, teknik wawancara (Hardani et al., 2020). Peneliti mewawancarai informan penting Masjid Syuhada yaitu direktur masjid, pengurus, dan Lembaga Pendidikan Masjid. Kedua, teknik dokumentasi. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dokumentasi yang terkait dengan manajemen dan tatakelola masjid, didapatkan dari data buku, jurnal dan majalah, website, media sosial dan bentuk lainnya. Ketiga, teknik observasi. Dengan teknik ini peneliti ikut terlibat sebagai observer melihat langsung kegiatan masjid tersebut di daerah kota baru, Yogyakarta.

Hasil dan Pembahasan

Masjid Syuhada sebagai *Ideal Speech Situation*

Masjid Syuhada Kotabaru, Yogyakarta merupakan masjid bersejarah yang memiliki semangat kemerdekaan. Berdiri pada 14 Oktober 1949, namun peletakan batu pertama pada 23 September 1950 dan resmi pada tanggal 20 September 1952. Pembangunan masjid ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pejuang yang gugur dalam pertempuran di Kotabaru (Ardianto, 2013). Masjid ini menjadi simbol agama dan bangsa, karena bukan hanya sebagai ruang ibadah melainkan monument hidup yang merepresentasikan para pejuang (syuhada). Sejarah menunjukkan bahwa lokasi Kotabaru menjadi tempat permukiman para colonial, sehingga masjid ini menjadi simbol identitas muslim dalam mempertahankan ideologinya. Mengingat para penjajah Belanda memiliki tujuan keagamaan juga dan membangun gereja di wilayah tersebut. Seiring waktu, masjid berkembang dari tempat ibadah ritual seperti salat menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan memberikan kehidupan sosial bagi masyarakat sekitar (Sopyan, 2015).

Dengan ditetapkannya sebagai Masjid Agung Kota Yogyakarta pada 1 April 2023, Masjid Syuhada kini menjadi ikon religius dan nasional di Yogyakarta menegaskan bahwa

sejarah perjuangan, iman, dan komunitas melebur dalam satu institusi yang hidup dan terus relevan. Narasumber menyampaikan bahwa masjid ini sudah menjadi cagar budaya keagamaan, di tengah banyaknya masjid memiliki bangunan yang megah dan modern, Masjid Syuhada mempertahankan ciri khasnya yang sudah ada sejak masa perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penerapan arsitektur pada Masjid Syuhada Kotabaru Yogyakarta secara keseluruhan telah memenuhi 77,8% aspek ekologis berdasarkan prinsip Brenda dan Robert Vale. Masjid ini memaksimalkan penghematan energi melalui bukaan jendela lebar dan *skylight* yang menghasilkan kenyamanan penghawaan serta pencahayaan alami yang stabil di sebagian besar zona bangunan. Dari sisi tapak, masjid ini mempertahankan 38,78% area vegetasi dengan berbagai jenis pohon dan menggunakan material lokal seperti batu bata, kayu, serta batu alam. Meskipun orientasi bangunannya efektif dalam meminimalisir panas matahari dan material atapnya telah mempertimbangkan nilai albedo untuk mencegah efek *heat island*, masjid ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek aksesibilitas karena hanya menyediakan tangga tanpa fasilitas *ramp* untuk disabilitas, serta belum mengoptimalkan penggunaan material daur ulang mengingat pembangunannya yang sudah dilakukan sejak 70 tahun lalu sebagai monumen perjuangan (Pramesvara et al., 2023).

Masjid Syuhada berfungsi sebagai lembaga keagamaan yang memiliki ruang integrasi identitas, mulai dari nilai Islam, nasionalisme, dan budaya Jawa. Melalui integrasi tersebut menghadirkan berbagai kebijakan pendidikan, budaya, sejarah, sampai dengan praktik sosial keseharian. Sejak awal berdiri, nilai nasionalisme tertanam melalui kurikulum sekolah dan berbagai program pembinaan remaja. Kurikulumnya memasukan nilai kebangsaan sejak TK sampai SMA, ini menjadi respon terhadap konteks pascakemerdekaan, ketika para pendiri memandang masjid sebagai medium pembentukan karakter kebangsaan pada umat agar religious, berkarakter lokal, dan mencintai tanah air. Nasionalisme dibangun tidak hanya melalui pendekatan pendidikan, tetapi pendekatan ekonomi dan kelembagaan menjadi

bukti bahwa masjid memberikan kehidupan bagi bangsa dan masyarakat sekitar.

Integrasi nilai budaya yang dibangun Masjid Syuhada adalah budaya lokal Jawa Yogyakarta. Masjid memberikan pengajaran etika, budaya, dan filosofi okasi sebagai bagian dari pendidikan karakter anak-anak, remaja masjid, dan masyarakat umum. Identitas budaya tidak hanya muncul dalam materi pembelajar, tetapi praktik terhadap tata krama, simbol identitas Jawa, dan sikap hormat yang ditanamkan dalam seluruh kegiatan sekolah dan kajian keagamaan masjid. Hal yang menarik, Ketika masjid menerapkan pakaian adat Jawa setiap hari Kamis baik untuk anak-anak, remaja, sampai dengan pengurus Masjid Syuhada (Ardyanto, n.d.).

Aspek historis menunjukkan bahwa keberadaan masjid berada di kawasan Kotabaru yang dulu menjadi wilayah colonial untuk orang Eropa dengan makna kultural yang kuat. Masjid sebagai tanda *reclaim* ruang warga pribumi dan umat Islam, perang nilai jelas terjadi antara umat muslim dan para colonial. Hal tersebut disampaikan oleh Panji Kumoro bahwa ini menjadi simbol ruang colonial bagi umat Islam dan identitas nasional. Aktivitas sosial yang berjalan sepanjang hari seperti sekolah kajian, kegiatan seni, ekonomi, hingga forum komunikasi menjadi bukti masjid sebagai ruang budaya yang hidup dalam menjaga nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan budaya Jawa. Moderasi menjadi fondasi integrasi tiga identitas tersebut. Independensi ini memungkinkan masjid memelihara atmosfer inklusif, menerima beragam latar umat, dan mempertemukan nilai Islam, nasionalisme, dan budaya lokal dalam ruang yang sama tanpa ketegangan ideologis.

Dilihat dari perspektif Habermasian, sebuah ruang publik hanya dapat berfungsi jika mampu menciptakan situasi bicara ideal yaitu dimana komunikasi berlangsung tanpa adanya pengaruh kekuasaan. Temuan lapangan peneliti di Masjid Syuhada menunjukkan keberhasilan pengurus masjid dalam membangun lingkungan yang inklusif terhadap hegemoni organisasi masyarakat atau politik tertentu. Meskipun secara letak geografis, masjid berada di wilayah dengan pengaruh kuat organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun Masjid Syuhada secara sadar

memosisikan diri sebagai suatu entitas yang tidak terafiliasi pada satu perahu atau organisasi Islam tertentu, bahkan mengikuti partai politik manapun. Netralitas ini bukan sekedar sikap pasif, melainkan sebuah strategi komunikasi aktif untuk menjamin kesetaraan dan netralitas, dimana setiap orang, kelompok dari berbagai golongan memiliki hak dan posisi yang setara dalam berdialog tanpa adanya tekanan hierarkis dari ideologi.

Data penelitian menunjukkan kolaborasi yang terjadi di Masjid Syuhada tidak menunjukkan sifat otoriter, melainkan berdasarkan tujuan bersama untuk membesarkan umat dan pengurus menyebutkan sebagai kesamaan azam. Hal ini merupakan bentuk nyata dari Tindakan komunikatif yang dilakukan oleh pengurus dalam koordinasi antara organisasi Islam dan kelompok masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, akademisi, dan mahasiswa untuk membangun consensus yang terlepas dari paksaan atau kepentingan politik. Masjid berhasil mengubah potensi konflik identitas menjadi energi positif dengan menghilangkan sekat-sekat sectarian. Kekuatan argument yang lebih baik menjadi penentu utama dalam pengambilan kebijakan organisasi, terlihat dari bagaimana berbagai golongan dapat menyatu dalam program lintas sektoral seperti pengelolaan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.

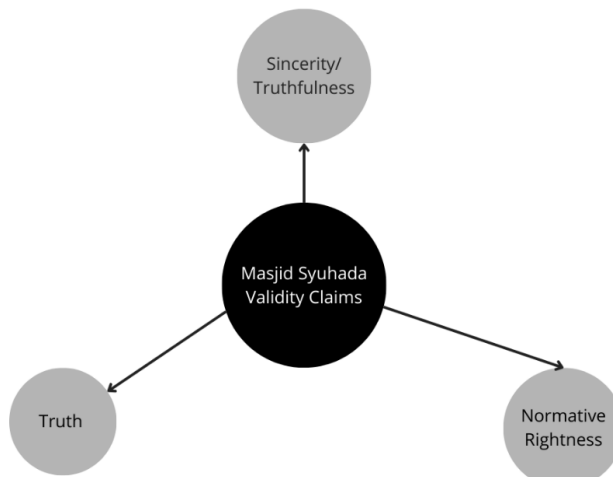
Inklusivitas merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonisasi ruang publik, masjid dalam mempertahankan statusnya sebagai wadah yang inklusif menjadi upaya sadar untuk mencegah kolonisasi dunia kehidupan oleh system politik dan kepentingan partisan tertentu. Banyak masjid di Indonesia terjebak dalam politisasi mimbar atau menjadi basis mobilisasi suara, Syuhada tetap konsisten menjadi ruang publik yang terbuka bahkan bagi kelompok yang secara historis dianggap berbeda. Fakta menarik bahwa masjid melibatkan rector berbagai universitas seperti UIN, UII, dan UGM serta mahasiswa merupakan motor penggerak untuk menunjukkan bahwa akses terhadap ruang publik ini bersifat meritokratis dan intelektual. Hal ini menciptakan iklim komunikasi yang sehat dan integritas masjid sebagai ruang sacral tetap terjaga sebagai laboratorium sosial yang

mempertemukan keberagaman pandangan dalam satu visi utama yaitu keumatan yang universal.

Menganalisis Strategi Melalui Klaim Validitas

Bagaimana suatu institusi keagamaan mampu berdiri tegak sebagai organisasi-organisasi yang secara historis sering terlibat dalam gesekan ideologis? Indonesia memiliki berbagai organisasi masyarakat dan Islam yang beragam, terkadang terdapat gesekan perbedaan pandangan yang sampai saat ini belum mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk saling menghargai setiap perbedaan. Masjid Syuhada mampu merangkul elemen-elemen tersebut, pada kasus ini adalah kelompok masyarakat yang beridentitas Muhammadiyah, NU, hingga akademisi menjadi satu ekosistem kolaborasi. Hal demikian memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana strategi komunikasi yang mampu meruntuhkan ego sektarian tersebut? Fenomena tersebut, dapat dijelaskan melalui pendekatan manajemen komunikasi organisasi masjid yang modern. Mekanisme komunikasi yang bekerja dibalik layar tidak dapat dijelaskan jika menggunakan pendekatan konvensional, Jurgen Habermas menyebutkan sebagai upaya pemenuhan klaim validitas universal. Masjid Syuhada melakukan kolaborasi bukan karena kesamaan identitas politik, melainkan karena adanya tingkat kepercayaan yang dibangun melalui tiga pilar validitas yaitu kebenaran fakta, ketepatan posisi etis, dan kejujuran niat. Hal tersebut disampaikan oleh Panji Kumoro dapat kesempatan diskusi dengan peneliti saat berkunjung ke Masjid Syuhada Yogyakarta.

Gambar 1. Teori Komunikasi Habermas



Pertama klaim ketepatan, masjid memiliki keselarasan tindakan komunikatif dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Data lapangan menunjukkan masjid memitigasi konflik kepentingan dengan memperkuat basis legal-formal melalui struktur Yayasan yang telah berbentuk hukum sejak tahun 1952. Hal ini menguatkan masjid memiliki legitimasi institusional dan otonomi hukum, formalisasi ini bukan sekadar administrative, melainkan sebuah strategi untuk melepaskan diri dari hegemoni figuritas atau otoritas organisasi masyarakat dan kepentingan politik tertentu. Pandangan Habermas tentang legitimasi institusional ini memberikan kepastian bagi berbagai pihak, khususnya adalah pihak kesteranal tentang Masjid Syuhada sebagai sebuah institusi publik yang berdaulat dan terlepas dari perpanjangan tangan politik. Hal ini yang memungkinkan organisasi dengan pandangan berbeda merasa tepat dan etis untuk berkolaborasi dibawah naungan yang sama karena adanya jaminan aturan main yang objektif dan non-partisan dari masjid.

Hasil wawancara bersama pengurus masjid menunjukkan ketepatan posisinya dengan mengadopsi struktur legal-formal berbentuk yayasan yang sudah memiliki akta notaris. Informan menenakan bahwa status hukum ini menjadi kunci utama untuk menjaga masjid tidak terseret ke dalam kutub organisasi tertentu. Hal ini memungkinkan masjid menjalankan fungsinya secara otonomi sebagai ruang publik yang independent. Melalui perspektif Habermas, struktur yayasan ini menjadi legal-rational framwork yang melindungi lifeworld jamaah dari intervensi kekuasaan politik atau kepentingan sectarian organisasi masyarakat. Pengurus sadar betul dan menolak label tertentu yang seringkali menjadi pembatas dalam ekosistem organisasi Islam di Indonesia. Strategi komunikasi ini cerdas memenuhi klaim ketepatan dengan memposisikan masjid sebagai common ground. Berbagai actor di Masjid Syuhada berkolaborasi membuktikan bahwa sebuah institusi mampu menjadi penengah yang adil dan memperoleh legitimasi dari berbagai spektrum ideologi yang berbeda.

Klaim ketepatan ini tercermin dalam konsistensi sejarah masjid yang inklusif, seperti tradisi menghadirkan penceramah Perempuan sejak tahun 1980an misalnya adalah Prof. Zakiah Daradjat. Konteks

sosiologi Indonesia, Langkah ini merupakan pemenuhan klaim ketepatan terhadap nilai yang progresid dan kesetaraan. Membuka ruang bagi suara-suara yang seringkali termarjinalkan dalam struktur masjid tradisional, masjid ini memperkuat statusnya sebagai situasi bicara ideal yang tidak hanya inklusif secara organisasi, tetapi secara gender dan perspektif juga.

Kedua klaim kebenaran, peneliti temukan pada transparansi data dan fakta pengelolaan masjid yang dapat diverifikasi oleh publik. Masjid Syuhada menunjukkan narasi sebagai pusat keunggulan melalui praktik manajemen yang meritokratis. Hal ini terbukti dari pelibatan para professional, mantan pimpinan sekolah favorit, sampai dengan jajaran rektor universitas yang mengikuti kegiatan masjid. Pengelolaan tidak hanya pada aspek kepengurusan saja, melainkan unit ekonomi dan pendidikan menjadi perhatian sebagai perputaran dana yang luar biasa memberikan manfaat untuk umat. Standar akuntabilitas tinggi dan melibatkan kaum muda menjadi ciri khas dari masjid. Keterbukaan informasi ini merupakan upaya memenuhi *validity claim of truth*, Ketika suatu organisasi mampu menyajikan fakta keberhasilan yang empiris dan terbuka bagi riset akademis, kecurigaan antar kelompok dapat direduksi untuk menciptakan kolaborasi yang strategis.

Diskursus Habermasian, klaim ini berkaitan dengan objektivitas fakta yang disampaikan oleh komunikator, dalam fenomena ini adalah Masjid Syuhada. Sebuah pesan dianggap benar jika memiliki referensi empiris yang dapat divalidasi oleh publik. Klaim kebenaran atas inklusifitas dan posisi netral dibuktikan bukan melalui retorika mimbar, melainkan melalui objektivitas hasil pengeolaan dan profesionalitas manajerial masjid yang transparan. Hasil temuan menungkapkan sebuah fakta menarik mengenai cara masjid membangun kepercayaan publik. Mereka melibatkan *figure professional* yang memiliki reputasi tinggi pada bidangnya. Salah satu contohnya adalah pengelolaan lembaga pendidikan dibawah naungan masjid berasal dari mantan kepala sekolah SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta, diketahui sekolah tersebut dikenal sebagai sekolah favorit dengan standar integritas yang tinggi. Keterlibatan tersebut menjadi bukti kebenaran bahwa masjid ini dikelola dengan

standar akuntabilitas yang objektif. Habermas menekankan komunikasi yang jujur harus didukung dengan kebenaran yang proposional. Ketika masjid menyatakan dirinya sebagai pusat keunggulan umat, hal tersebut divalidasi dengan berbagai fakta tentang program masjid, pakar kompeten yang tidak terlibat dengan organisasi masyarakat atau politik tertentu.

Masjid memiliki transformasi yang disebut sebagai “Azam” merupakan realitas empiris yang krusial dalam pengelolaan dana umat yang mencapai angka signifikan. Narasumber menyampaikan bahwa melalui unit-unit seperti Lembaga zakat, infaq, dan shadaqah (Lazis) dan lembaga pendidikan, masjid mengelola perputaran dana hingga ratusan sampai dengan miliaran rupiah setiap bulannya. Klaim kebenaran muncul melalui transparansi laporan, informan menekankan pentingnya keterlibatan kaum muda seperti mahasiswa dan remaja masjid dalam operasional harian. Dengan melibatkannya, masjid menciptakan system check and balance internal. Secara analitis, keterbukaan informasi keuangan dan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi menjadi fakta objektif yang membuktikan bahwa tujuan masjid untuk membesarkan umat adalah suatu kenyataan dan bukan sekadar janji kosong.

Inklusifitas progresif sebagai kebenaran sejarah menyoroti fakta sejarah Masjid Syuhada merupakan pelopor dalam menghadirkan penceramah Perempuan pada shalat tarawih pada tahun 1980-an. Perspektif Habermas menilai ini merupakan pemenuhan klaim kebenaran terhadap nilai inklusivitas dan keterbukaan terhadap semua pihak yang memiliki kompetensi dalam menyampaikan kebenaran. Fakta sejarah ini memberikan bukti empiris sebagai karakter inklusifitas masjid dan tidak terbantahkan buktinya secara empiris. Keterlibatan aktif para rektor dan dosen dari berbagai universitas besar dalam struktur kepengurusan maupun sebagai mitra riset memperkuat klaim kebenaran secara intelektual. Masjid ini tidak menutup diri dari kritik akademis; sebaliknya, ia menjadikan dirinya sebagai subjek penelitian dan studi banding. Keterbukaan terhadap audit intelektual dan riset eksternal (seperti yang dilakukan oleh mahasiswa PKI atau peneliti lintas agama) membuktikan bahwa Masjid Syuhada beroperasi di atas

koridor kebenaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik.

Ketiga yaitu klaim Kejujuran (*Sincerity*) sebagai autentisitas dan konsistensi sejarah, konsistensi antara identitas sejarah masjid dengan praktik komunikasinya saat ini. Sebagai "Masjid Perjuangan" yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa, Masjid Syuhada mempertahankan kejujuran moralnya dengan tidak mengomodifikasi mimbar untuk kepentingan politik elektoral. Data menunjukkan inklusivitas yang autentik, seperti tradisi menghadirkan penceramah perempuan sejak tahun 1980-an sebuah langkah yang melampaui sekat konservatisme agama pada masanya. Keberanian untuk bersikap inklusif dan progresif ini memperkuat persepsi publik bahwa pesan kesatuan yang disampaikan masjid adalah jujur (*sincere*), bukan sekadar retorika untuk menarik simpati. Dalam ekosistem kolaborasi, klaim kejujuran ini membangun *social capital* yang krusial; para aktor bersedia bekerja sama karena mereka memercayai karakter dan integritas Masjid Syuhada sebagai mediator yang tulus.

Teori Habermas tentang klaim kejujuran, ini merupakan salah satu dari tiga klaim validitas universal yang harus dipenuhi agar komunikasi mencapai sama paham. Teori ini tidak merujuk pada kebenaran fakta objektif, melainkan pada kesesuaian antara niat batin penutur dengan ekspresi yang ditunjukan secara publik. Habermas membagi menjadi tiga ranah yaitu objektif, sosial, dan subjektif. Masjid dianggap jujur jika tidak memiliki agenda tersembunyi dan tidak adanya jarak antara pengurus dengan umat dalam berkomunikasi. Masjid Syuhada sebagai ruang terbuka dan inklusif menunjukkan kejujuran yang divalidasi melalui konsisten sejarah dan keberanian moral dalam menjaga kemurnian ruang publik keagamaan. Dalam banyak kasus, institusi agama sering terjebak dalam pragmatis inklusivitas, bersifat terbuka hanya saat membutuhkan dukungan publik. Namun berbeda dengan Masjid Syuhada yang diukur dari sejarah samapi dengan saat ini menunjukkan keterbukaan yang konsisten dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan keuntungan politik yang didapat.

Lanskap sosiologi agama di Indonesia, Masjid Syuhada memunculkan fenomena unik yang diistilahkan dengan “keikhlasan kolektif”. Fenomena ini berakat dari filosofi kesamaan azam untuk membesarkan umat dan masjid perkotaan ini. Sebuah determinasi internal yang melampaui sekadar kesepakatan administrative. Secara setimologis dan filosofis, Azam merujuk pada kehendak kuat yang terhimpun untuk memuliakan umat secara transcendental. Pengurus menjelaskan bahwa kolaborasi antar elemen Muhammadiyah, NU, dan kelompok lainnya di masjid terjadi karena adanya kepercayaan bahwa masjid sedang tidak mencari panggung politik atau keuntungan pribadi. Habermas menegaskan bahwa keberhasilan interaksi sosial sangat bergantung pada pemenuhan klaim validitas, dimana ketulusan subketif menjadi pilar utama. Masjid Syuhada merepresentasikan hal tersebut dengan memiliki actor-aktor yang saling percaya, dengan tidak adanya bendera organisasi masyarakat atau politik tertentu. Dengan meniadakan hal demikian, membuktikan motif utama masjid untuk pengabdian keagamaan, pemberdayaan masyarakat, bukan ekspansi ideologi tertentu. Perspektif Habermas menunjukkan bahwa untuk mencapai consensus, harus bisa memenuhi semua keinginan setiap aktor yang terlibat atau tidak memiliki agenda strategi yang tersembunyi. Motif pengabdian yang murni memposisikan masjid sebagai ruang yang steril.

Autentisitas progresivitas di Masjid Syuhada merupakan sebuah fenomena sosiologis-religius yang melampaui batas-batas zaman. Peneliti sangat tertarik dengan pernyataan terdapat penceramah Perempuan pada saat shalat tarawih. Hal tersebut kami nilai sebagai kejujuran moral institusional dalam memanifestasikan masjid melalui kebijakan radikal yang mendahului konsensus publik pada masanya, mengingat itu terjadi pada tahun 1983-1984. Sebuah gerakan yang berani, dimana saat itu diskursus kagamaan di Indonesia masih terbelenggu oleh nalar patriarki yang konservatif dan restriktif terhadap peran publik perempuan dalam ranah sacral dan sosial. Habermas memandang fenomena ini sebagai klaim kejujuran yang bersifat diakronis, masjid dapat membuktikan narasi inklusivitas bukanlah sekadar respon pragmatis terhadap tren atau upaya pencitraan.

Sebaliknya yang dilakukan oleh masjid menjadi refleksi nilai autentik yang telah terinternalisasi secara organik dan konsisten adalah bukti visi institusi dan ekspresi publik yang selaras dan tidak terdistorsi kepentingan politik. Eksistensi progresivitas berakat dari sejarah menjadi transformasi modal social (social capital) yang sangat massif, masjid sebagai mediator yang memiliki legitimasi moral tak terbantahkan di mata berbagai kelompok kepentingan. Kejujuran moralnya teruji, sehingga menciptakan kepercayaan yang tinggi, masjid tidak dipandang memiliki kepentingan politik tertentu dan dinilai sebagai ruang publik yang murni serta tulus.

Masjid Syuhada mengukuhkan eksistensinya sebagai ruang publik yang otonom (*autonomous public sphere*), karena secara konsisten menjaga jarak kritis terhadap penetrasi kekuasaan maupun polarisasi partisan. Habermas menilai integritas sebuah institusi dalam ruang publik diuji melalui kemampuannya menolak kolonisasi system. Masjid ini memosisikan diri sebagai suara umat yang independen. Kejujuran sikap ini divalidasi melalui kebijakan steril ruang sakral dari segala bentuk atribut politik praktis, membuktikan adanya kesesuaian absolut antara klaim validitas subjektif pengelola praktik nyata di lapangan. Dengan menolak menjadi instrument politik, masjid berhasil membangun komunikasi yang setara dan terbuka, dimana kritik terhadap kekuasaan tetap dapat disampaikan secara santun dan teologis tanpa terjebak dalam kepentingan transaksional kelompok tertentu.

Keberhasilan menjaga independensi menciptakan modal kepercayaan yang fundamental untuk kemajuan suatu institusi. Terbukti dengan banyaknya kolaborator yang terlibat di Masjid Syuhada seperti NU, Muhammadiyah, Ulama, dan elemen masyarakat lainnya untuk berinteraksi tanpa kecurigaan akan adanya agenda tersembunyi. Konsistensi institusional yang dimiliki memenuhi prasyarat Habermas mengenai integritas aktor komunikatif, dimana transparansi motif menjadi fondasi bagi terciptanya Tindakan komunikasi yang murni untuk mencapai satu paham. Masjid Syuhada memiliki otoritas moral yang kuat untuk bertindak sebagai mediator yang tulus dalam konflik sosial-keagamaan. Akhirnya otonomi yang dijaga dengan keberanian memastikan bahwa masjid tetap menjadi lembaga yang sehat, menjaga

Marwah agama dari kepentingan kekuasaan yang dapat merusak keseimbangan dan kredibilitas.

Spiritual yang tersita dari filosofi busana “Shorjan”, integrasi nilai kearifan local ke dalam ruang publik keagamaan Masjid Syuhada mencapai puncaknya pada adopsi filosofi busana ini. Secara semantic bermakna *pepadhanging nalar* atau selarasnya antara dimensi batiniah, lisan, dan lahiriah. Diskursus agama menilai ini sebagai jangkar moral yang menuntut kesesuaian antar niat, retorika publik, dan implementasi kebijakan. Metafora Shorja ini merupakan manifestasi local yang sangat presisi terhadap klaim kejujuran dalam teori Tindakan komunikatif Habermas. Keinginan kolektif pengurus untuk memosisikan masjid sebagai entitas yang menyatukan berbagai faksi keagamaan baik tradisional, nasional maupun kelompok agama tertentu bukan menjadi retorika untuk memenangkan simpati massa. Melainkan sebuah kejujuran batin yang terinkarnasi dalam prinsip masjid harus menjadi ruang yang nyaman dan aman bagi semua tanpa kecuali.

Otentisitas dari klaim kejujuran ini tidak hanya berhenti pada level diskursus, tetapi terujud secara spasial dan manajerial melalui struktur fisik dan kebijakannya. Keselarasan arsitektur bangunan yang mengusung konsep Garden City yang terbuka dan tanpa sekat fisik yang kaku, telah mencerminkan transparansi dan inklusivitas manajemen yang dijalankan didalamnya. Habermas memandang, konsistensi antara lingkungan dan kebijakan manajemen yang terbuka dapat memperkuat persepsi publik bahwa kejujuran adalah napas utama dalam setiap tindakan komunikatif yang dilakukan oleh Masjid Syuhada. Shorjan memastikan bahwa setiap keputusan tidak memiliki agenda tersembunyi sehingga menciptakan iklim kepercayaan yang tulis ditengah masyarakat plural. Dengan demikian, masjid melakukan pribumisasi terhadap rasionalitas komunikatif, dimana integritas antara hati, ucapan, dan perbuatan menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan ruang publik keagamaan yang sehat.

Memerangi "Kolonisasi" dalam Menjaga Inklusifitas

Salah satu tesis paling krusial dari Jurgen Habermas adalah kekhawatiran mengenai "kolonisasi dunia kehidupan" (*colonization of*

the lifeworld) oleh sistem kekuasaan dan pasar. Dalam konteks Indonesia kontemporer, "sistem" ini sering bermanifestasi dalam bentuk penetrasi politik praktis ke dalam institusi keagamaan, yang mengubah fungsi masjid dari ruang dialog menjadi instrumen mobilisasi suara. Namun, temuan penelitian di Masjid Syuhada menunjukkan sebuah anomali yang mencerahkan: sebuah perlawanan sistemik melalui strategi komunikasi yang inklusif dan non-partisan.

Data lapangan menunjukkan Masjid Syuhada konsisten menerapkan apa yang diistilahkan sebagai protocol komunikasi yang ketat, guna memproteksi kemurnian ruang publik keagamaan dari intervensi eksternal. Narasumber menegaskan identitas bahwa masjid ini bukan milik organisasi tertentu, masjid ini bukan Muhammadiyah dan bukan NU juga. Pengurus masjid melakukan Tindakan delimitasi yang strategi sebagai Langkah yang tidak sekadar berfungsi untuk menghindari framentasi sectarian yang seringkali melumpuhkan kohesi umat. Dengan meniadakan atribut tersebut, masjid otomatis menutup celah bagi actor politik yang berniat menunggangi legitimasi lembaga keagamaan demi kepentingan partisan. Sehingga agama tidak menjadi komoditas politik yang mencederai marwah Islam.

Secara teoritis, strategi ini merupakan upaya sadar untuk mencegah apa yang disebut Habermas sebagai kolonisasi lifeworld. Istilah ini adalah ranah tempat komunikasi autentik, tradisi, dan refleksi spiritual berlangsung. Namun, ranah ini terus menerus terancam oleh infiltrasi system yaitu logika kekuasaan dan logika uang. Jika masjid berafiliasi pada satu Kompas politik tertentu, agama seketika terdegradasi menjadi komoditas politik dan arena kontestasi kekuasaan, yang pada gilirannya akan mendistorsi komunikasi antar masyarakat.

Melalui kebijakan non-partisan yang radikal, masjid memastikan bahwa lifeworld umat Islam sekitar tetap terjaga sebagai ruang publik otonom. Ruang ini, setiap individu dapat melakukan refleksi spiritual dan dialog deliberative tanpa bayang manipulasi ideologis. Integritas aktif komunikatif di masjid dibuktikan melalui konsistensi dalam menjaga jarak dari politik praktis, sehingga mampu mempertahankan otoritas moralnya sebagai penjaga ruang publik yang murni, tempat

dimana kekuatan argument yang lebih baik diutamakan daripada kekuatan simbol kekuasaan.

Intelektualitas sebagai antitesis populisme, ini menjadi transformasi logika dominasi menjadi konsensus rasional. Dalam lanskap sosial-politik kontemporer, kolonisasi agama oleh kepentingan politik seringkali beroperasi melalui mobilisasi populisme religious yang bersifat emosional, simpatif, dan eksklusif. Masjid harus sadar dan memposisikan diri sebagai antithesis dari tren tersebut dengan meng-institusikan profesionalisme meritokratis dan sinergi akademis ke dalam jantung manajemen masjid. Masjid Syuhada menjadi contoh dalam manajemen masjid, fenomena ini bukan sekadar pergantian figur kepemimpinan, melainkan sebuah transformasi epistemology dalam wajah komunikasi keagamaan. Keterlibatan aktor intelektual membawa kultur akademis yang mengedepankan rasionalitas, objektivitas, dan keterbukaan pada kritik ke dalam ruang publik keagamaan.

Kehadiran tokoh intelektual di masjid menggeser paradigma pengambilan keputusan dari logika kekuasaan (*power-based logic*) menjadi logika consensus intelektual yang berbasis pada data dan analisa mendalam. Habermas memandang ini merupakan perwujudan dari the unforced force of better argument (kekuatan tanpa paksaan dari argument yang lebih baik). Klaim validitas tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki otoritas politik atau massa terbanyak, melainkan oleh kualitas argument yang mampu bertahan dalam uji diskursus publik. Proses deliberasi yang dipandu oleh standar intelektual ini memastikan bahwa setiap kebijakan manajerial dan pesan keagamaan yang keluar memiliki fondasi rasional yang kuat.

Integrasi nilai ini berfungsi sebagai benteng terhadap narasi populisme yang seringkali memanipulasi sentiment emosional jamaah demi kepentingan partisan. Dengan menjadikan intelektualitas sebagai standar utama, masjid berhasil menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat, dimana perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog rasional, forum, bukan melalui dominasi ideologis atau intimidasi massa. Kehadiran para akademisi ini memberikan jaminan bahwa masjid tetap menjadi ruang bagi pencerahan intelektual dan refleksi spiritual yang jernih. Masjid Syuhada membuktikan bahwa institusi

agama yang dikelola dengan nalar intelektual yang kuat, tidak akan mudah hancur dan terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu.

Riset ini menyimpulkan Masjid Syuhada telah melampaui fungsinya sebagai sekadar tempat ritual keagamaan dan bertransformasi menjadi sebuah *counter public sphere* yang resilien. Di tengah derasnya arus kolonisasi politik yang berusaha mereduksi agama menjadi instrumen kekuasaan, masjid berhasil mempertahankan otonominya sebagai ruang deliberative yang sehat. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui strategi komunikasi inklusif yang secara ketat memenuhi tiga klaim validitas universal dalam teori Tindakan komunikatif Habermas yaitu klaim kebenaran melalui pengelolaan data dan informasi yang objektif, klaim ketepatan melalui kepatuhan pada norma inklusivitas sosial, dan klaim kejujuran melalui konsistensi antara filosofi batiniah dengan kebijakan manajerial di lapangan.

Model Syuhad ini menawarkan paradigma baru bagi masjid-masjid di tingkat global, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer berupa radikalisme transnasional dan politisasi agama yang semakin meningkat. Model ini membuktikan bahwa netralitas institusional bukanlah sebuah sikap pasif, melainkan sebuah tindakan aktif yang didukung oleh manajemen profesional-meritokratis dan keterbukaan intelektual. Dengan mengintegrasikan para akademisi dan praktisi profesional ke dalam struktur manajerial, masjid berhasil menggeser logika massa yang emosional menjadi logika argumen yang rasional. Strategi "Pagar Pembatas" terhadap politik praktis yang diterapkan bukan bertujuan untuk mengisolasi diri dari realitas sosial, melainkan untuk memastikan bahwa *lifeworld* jamaah tetap menjadi ruang bagi komunikasi autentik dan refleksi spiritual yang merdeka dari distorsi kepentingan partisan.

Secara sosiologis, Masjid Syuhada memberikan preseden penting bagi pembangunan kembali ekosistem kolaborasi umat yang harmonis di skala internasional. Dengan menanggalkan "bendera" sektarian dan mengedepankan "Kesamaan Azam" untuk kemaslahatan publik, institusi ini menunjukkan bahwa keberagaman mazhab (seperti Muhammadiyah dan NU) dapat berkoeksistensi secara produktif dalam satu payung manajemen yang transparan. Keberhasilan ini

menegaskan bahwa integritas moral aktor komunikatif dan independensi institusional adalah prasyarat mutlak bagi masjid untuk kembali menjadi pusat pencerahan peradaban. "Model Syuhada" pada akhirnya berdiri sebagai sebuah tesis yang kuat: bahwa di tengah krisis kepercayaan global, masjid yang jujur, intelektual, dan non-partisan adalah kunci bagi terciptanya masyarakat sipil yang religius namun tetap rasional dan demokratis.

Simpulan

Masjid Syuhada merupakan masjid yang bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, melainkan tempat pembangun peradaban yang terbukti mampu membangun komunikasi inklusif untuk mendorong kolaborasi keagamaan. Peran komunikasi inklusif masjid menciptakan ruang terbuka yang ideal untuk berkomunikasi dalam berbagai pandangan dan organisasi masyarakat beragam. Hal tersebut diciptakan melalui kebijakan birokrasi masjid yang memilih untuk memiliki akta notaris dan tidak terikat pada identitas organisasi masyarakat tertentu yang disampaikan oleh pengurus bahwa Masjid Syuhada bukan Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama, serta berbagai narasumber program masjid yang berasal dari beragam latar belakang. Hasil analisis menunjukkan strategi melalui klaim validitas yaitu kebenaran, ketepatan, dan kejujuran yang dibangun.

Klaim ketepatan dibangun masjid dengan menunjukkan selarasnya komunikasi kebijakan dalam membangun yayasan Masjid Syuhada dengan basis legal formal. Kedua klaim kebenaran menjadi komunikasi yang dibangun masjid guna menunjukkan transparansi data dan fakta pengelolaan yang dapat diverifikasi publik. Terakhir adalah klaim kejujuran sebagai ruang terbuka dan inklusif menunjukkan kejujuran yang divalidasi melalui konsisten sejarah dan keberanian moral dalam menjaga kemurnian ruang publik keagamaan. Melalui komunikasi inklusif tersebut, masjid mampu memerangi berbagai kepentingan organisasi masyarakat atau politik praktis dengan mengedepankan tujuan masjid dan berbagai keputusan diambil melalui musyawarah. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih besar terhadap

cara komunikasi masjid dalam membangun umatnya dan menghindari diri dari kepentingan politik yang akan merugikan umat.

Referensi

- Adriansyah, L. R., & As-Salafiyah, A. (2025). Mataram mosques management: intention to place mosque funds in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(5), 915–936. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0330>
- Ardianto, R. (2013). Pemberdayaan Masjid Perspektif Politik Islam Studi Kasus Masjid Syuhada' Yogyakarta 2008-2013. In *digilib.uin-suka.ac.id*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/27600>
- Ardyanto, R. (n.d.). Pemberdayaan Masjid Perspektif Politik Islam Studi Kasus Masjid Syuhada'Yogyakarta 2008-2013. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*. Retrieved December 5, 2025, from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/27600>
- Donna Swarthout. (2013, December 12). *Oral Communication: Definition, Types & Advantages*. Education Portal Academy. <http://education-portal.com/academy/lesson/oral-communication-definition-types-advantages.html#lesson>
- Habermas, Calhoun, C., Mendieta, E., & VanAntwerpen, J. (2013). *Habermas and Religion* (1st ed.). Polity Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action* (Vol. 1). Beacon Press.
- Habermas, J., & McCarthy, T. (1987). *The Theory of Communicative Action* (Vol. 2). Beacon Press.
- Hardani, Hikmataul Auliya, N., Andriani, H., Asri Fardanim, R., Ustiawaty, J., Fatmi Utami, E., Juliana Sukmana, D., & Rahmatul Istiqomah, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st ed.). Pustaka Ilmu. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>

- Hidayah, N. (2018). *LAZIS MASJID SYUHADA TAHUN 2004-2016 M*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/847327>
- Hidayati, I., al-Afkar, N. I., Studies, J. F. I., & 2025, undefined. (2025). The Strategy of Islamic Religious Education Teachers in Overcoming Students' Difficulties in Reading the Qur'an at SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. *Mail.al-Afkar.Com*, 8(1). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.2190>
- Indriana, M. M., & Rohim, A. N. (2025). Analysis of Good Amil Governance Implementation in Mosque-Based Amil Zakat Institution. *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society*, 9(1), 6–29.
- Mayang, S. (n.d.). Masjid Syuhada Yogyakarta's Development in Zakat, Infaq, and Shadaqah from 2015 to 2019. *Jurnalasfa.Org*, 1(1), 2023. Retrieved December 16, 2025, from <https://jurnalasfa.org/index.php/asfaziswaf/article/view/6>
- Mibtadin, M., & Hedi, F. (2020). Masjid, Khutbah Jumat, dan Konstruksi Realitas Keagamaan di Ruang Publik: Studi tentang Materi Khutbah Jumat di Masjid-Masjid Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 40–53. <https://doi.org/10.21580/JID.V40.1.5297>
- Mohammed, A. S., Amoah, C., Abbas, J., & Naayif, S. (2025). Facilities managers vs. mosque management committees: evaluating the need for professional facilities management in mosque operations. *Facilities*, 43(5–6), 363–396. <https://doi.org/10.1108/F-07-2024-0102>
- Mulyani, T. (2019). Deradikalisasi Masjid Inklusi: Upaya Penghapusan Ideologi Radikal di Yogyakarta. *ejournal.uin-suka.ac.id*, 3(1), 55–74. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-03>
- Oktarina, A., & Asnaini. (2018). Developing models of productive WAQF Masjid Agung Syuhada Yogyakarta. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(1), 103–126. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3719>

- Pertiwi, R. R. (n.d.). Manajemen Dakwah Berbasis Masjid. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*. Retrieved December 16, 2025, from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8594/>
- Pramesvara, I. J., Annisa, R., & Fajriyanto. (2023). *Penerapan Arsitektur Ekologis Pada Masjid Syuhada Kotabaru, Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47203>
- Ryu, Y. (2025). Local government administration and biopolitics: Surrounding conflicts over the construction of mosque in South Korea. *Cities*, 159, Article 105790. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105790>
- Sopyan, I. (2015). *Dari Dakwah Normatif Ke Dakwah Transformatif: Dinamika Kaum Muda Masjid Syuhada Yogyakarta, 1980-An* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15504/>
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Syuhada, W., ... S. M.-J. E., & 2024, undefined. (n.d.). Optimalisasi Bazar Masjid sebagai Katalisator Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Perumahan Sukaraya Indah Bekasi. *Journal. Lppmpelitabangsa.Id*. Retrieved December 16, 2025, from <https://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/1912>
- Yusuf, A. (2023). *Analisis Kolaborasi Aktor Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid di Yogyakarta (Studi Kasus: Masjid Syuhada)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48109>